

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini, menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien tetapi tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat, yaitu sistem pemerintahan desentralisasi.

Dengan adanya peraturan pemerintah daerah sejak awal reformasi membuat daerah-daerah semakin aktif. Daerah yang pada masa orde baru diterapkan sistem pemerintahan desentralisasi semu, kini mulai bergerak untuk mendapatkan hak-haknya dengan “otonomi daerah”, menuntut pemerintah pusat memberikan sepenuhnya kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri.

The Liang Gie (dalam Suriakusumah dan Prayoga, 2011, hlm. 6) mengemukakan bahwa “Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.” Dengan adanya desentralisasi ini, masyarakat menuntut pemerintah untuk merestui pemekaran daerah untuk pembentukan Daerah Otonom Baru. Maraknya pembentukan daerah otonomi di Indonesia dalam kurun waktu dasawarsa terakhir mengakibatkan ledakkan jumlah provinsi dan Kabupaten/kota di Indonesia. Sebagai perbandingan pada masa sebelum reformasi, jumlah provinsi di Indonesia adalah 27 provinsi. Namun, setelah masa reformasi, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar. Hingga pada saat ini jumlah provinsi di Indonesia ada 34 provinsi.

Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 2 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU

No. 32 tahun 2004, lalu diubah sebagian dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut maka dikeluarkan PP No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan Daerah Otonom Baru, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti dengan PP No. 78 tahun 2007 karena dianggap terlalu mudah dalam meloloskan daerah. Peraturan yang baru ini dinilai lebih ketat dari peraturan sebelumnya.

Perkembangan wilayah atau pemekaran wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis.

Berkembangnya wilayah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya daerah otonom baru dari pemekaran daerah induknya. Proses seperti inilah yang semestinya menjadi acuan dasar dalam melahirkan daerah otonom baru di Indonesia. Sebuah daerah yang sudah layak menjadi daerah otonom karena memiliki potensi ekonomi yang memenuhi syarat bagi kehidupan warganya untuk dapat tumbuh dan berkembang. Secara perlahan tapi pasti, tanpa menimbulkan beban keuangan negara, wilayah tersebut akan berkembang sesuai mekanismenya.

Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat. Dalam bahasa yang sederhana yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan lebih merata. Masing-masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing masing.

Menurut Riwukaho (dalam Suriakusumah dan Prayoga, 2011, hlm. 9) bahwa kebaikan-kebaikan dari desentralisasi adalah :

1. Mengurangi bertumpuk-tumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu intruksi dari pusat.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.

4. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu.
5. Daerah otonom dapat menjadi laboratorium dalam hal yang berhubungan dengan pemerintahan.
6. Mengurangi kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
7. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya langsung.

Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru yang sebelumnya masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Ciamis, maka sejak Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 17 Juli 2012 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai daerah otonom dengan segala hak berupa kekayaan /asset yang sebelumnya masuk dalam PAD Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Kemudian, melantik kepala daerah, dalam hal ini Penjabat Bupati yakni Endjang Naffandy. Pada pembentukan dan diresmikannya Kabupaten Pangandaran ada tiga tahapan atau momentum. Pertama pada tanggal. 17 Juli 2012 adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 21. Kedua, tanggal 25 Oktober 2012 dikeluarkannya keputusan dan disahkannya Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonom Baru (DOB), oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan diatur pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kemudian, pada tanggal 22 April 2013, diresmikannya Kabupaten Pangandaran oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sekaligus melantik kepala daerah, dalam hal ini Penjabat Bupati yakni Endjang Naffandy.

Tentu saja dengan berdirinya daerah otonomi Kabupaten Pangandaran ini, masyarakat Kabupaten Pangandaran memiliki persepsi dan ekspektasi (harapan) mengenai berdirinya Kabupaten Pangandaran. Sebagaimana menurut Nina (2011, hlm. 3) Persepsi adalah pemaknaan/arti terhadap informasi (energi/stimulus) yang masuk ke dalam kognisi manusia. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Sedangkan teori ekspektasi (harapan) dikemukakan oleh Vroom (dalam Umar, 1998 hlm.40) yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Teori ekspektasi berasumsi bahwa seseorang mempunyai keinginan untuk menghasilkan suatu karya pada waktu tertentu tergantung pada tujuan-tujuan khusus orang yang bersangkutan dan juga pemahaman seseorang tersebut tentang nilai suatu prestasi kerja sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Ekspektasi menekankan pada hasil yang akan dicapai. Hasil yang diinginkan dipengaruhi oleh tujuan pribadi seseorang dalam memenuhi kebutuhan. Dalam teori ini, seseorang akan memaksimalkan sesuatu yang menguntungkan dan meminimalkan sesuatu yang merugikan bagi pencapaian tujuan akhirnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pangandaran, beberapa masalah yang terungkap dalam persepsi dan ekspektasi tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran adalah :

1. Berdirinya Kabupaten Pangandaran merupakan suatu terobosan yang baik dalam pemerataan pemerintahan di Jawa Barat dan merupakan cita-cita bersama seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran, oleh karenanya berdirinya DOB Kabupaten Pangandaran menjadi titik awal pembangunan yang signifikan setelah Kabupaten Pangandaran lepas dari Kabupaten Ciamis. Ini merupakan cita-cita bersama, impian agar Pangandaran menjadi daerah pariwisata yang dapat memajukan daerahnya sendiri tanpa harus membagi penghasilan daerahnya ke daerah lain.
2. Dengan berdirinya Kabupaten Pangandaran menjadikan pusat pemerintahan menjadi dekat. Jadi, bila ada keperluan bisa lebih efektif dan efisien serta banyak membuka lapangan pekerjaan yang baru.
3. Harapan masyarakatnya yaitu agar Kabupaten Pangandaran berdiri dan berjalan dengan baik, lingkungannya bersih, mengutamakan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran menjadi meningkat. Masyarakat sangat antusias, untuk menunggu perubahan yang dibawa oleh pejabat bupati yang sekarang sedang menjabat.
4. Karena Kabupaten Pangandaran masih dalam masa transisi dan pemerintahan daerahnya pun masih dalam proses melakukan perbaikan-perbaikan di setiap

daerah, maka yang dirasakan masyarakatnya saat ini di bidang pendidikan sudah baik, di bidang pemerintahan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) nya masih kurang. Sedangkan di bidang pariwisata meningkat, tetapi akses jalan menuju lokasi wisata masih banyak yang rusak. Selain itu juga memang infrastruktur jalan di beberapa daerah masih menunggu perbaikan-perbaikan.

Penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERSEPSI DAN EKSPEKTASI MASYARAKAT TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Deskriptif di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah untuk penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi dan ekspektasi masyarakat tentang pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran?”. Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, sub-sub rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat setelah Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru?
3. Bagaimana ekspektasi (harapan) masyarakat setelah Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru?
4. Bagaimana realisasi ekspektasi (harapan) masyarakat setelah Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru?

C. Tujuan Penelitian

Guna memberikan penjelasan dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui persepsi masyarakat mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran.
2. Menganalisis dampak yang dirasakan masyarakat setelah Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru.
3. Mengidentifikasi ekspektasi (harapan) masyarakat setelah Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru.
4. Mengetahui realisasi ekspektasi (harapan) masyarakat setelah Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru telah tercapai apa belum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pelaksanaan penelitian dan pengembangan keilmuan tentang persepsi dan ekspektasi masyarakat tentang pembentukan Daerah Otonom Baru.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, pemikiran, dan informasi berkaitan dengan berdirinya Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran.
- b. Dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan didalam penyusunan skripsi meliputi :

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen- dokumen atau data- data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori- teori yang mendukung penelitian penulis.
- BAB III : Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang penulis teliti.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil data tentang Persepsi dan Ekspektasi Masyarakat Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran.
- BAB V : Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.